

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL MIKRO DAN PERDAGANGAN (DISKUKMP) KOTA BANJAR

Sindi Febrianti

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : sindyfeb27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator masalah yaitu pihak dinas kurang memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan permodalan, pihak dinas kurang mempermudah aksesibilitas pasar bagi UMKM, pihak dinas kurang membantu pengembangan kemitraan UMKM. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar. Desain penelitian menggunakan deskriptif analisis, peneliti akan menguraikan data-data yang ada, menguraikan situasi yang terjadi dan proses yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang terjadi saat ini. Sumber data diperoleh langsung dari informan melalui observasi dan wawancara. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar yang diukur dengan 5 dimensi dan terdiri dari 10 indikator dapat diketahui bahwa 5 indikator sudah berjalan dengan optimal dan 5 indikator belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu anggaran yang ada masih belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan permodalan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dengan perbankan mitra pemerintah supaya pelaksanaan pelatihan kemampuan dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

PENDAHULUAN

perkonomian suatu negara/daerah. Usaha Mikro kecil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menengah merupakan salah satu menjadi salah satu prioritas dalam bagian penting dalam membangun agenda pembangunan pemerintah

Indonesia. Hal ini terbukti dari bertahannya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat terjadi krisis hebat tahun 1998, bila dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengatasi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah disamping menegembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pentingnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 1 ayat (10) :

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk

memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan hasil observasi di Kota Banjar ditemukan permasalahan-permasalahan mengenai belum optimalnya Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar dalam melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini ditunjukkan dengan indikator-indikator diantaranya :

1. Pihak Dinas kurang memfasilitasi bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan permodalan, sarana dan prasarana sehingga banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak dapat berkembang, karena keterbatasan modal, sarana dan prasarana. Contoh berdasarkan survei lapangan masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan permodalan baik berupa materi maupun sarana dan prasarana.
2. Pihak Dinas kurang mempermudah aksesibilitas pasar dan informasi para pelaku UMKM di Kota Banjar. Contoh yang ditemukan dilapangan adalah para pelaku UMKM masih kesulitan mendapatkan pasar penjualan sehingga masih banyak pelaku

UMKM yang ruang lingkup pemasaran yang belum luas.

3. Pihak Dinas kurang membantu dalam pengembangan kemitraan UMKM. Contoh berdasarkan dilapangan kemitraan rantai pasok masih kurang optimal, dimana UMKM selaku penyedia barang masih kesulitan dalam menjalin mitra dengan pihak swasta yang berperan sebagai penerima barang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar ?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, pemberdayaan dapat di artikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rappaport (Mardikanto, 2020 : 29) bahwa : ‘Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi di arahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya’. Menurut Sudarmanto (2020:21) menyatakan bahwa : “ Pemberdayaan masyarakat

adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan”.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat demi perbaikan kehidupannya.

Menurut Zubaedi (2013:162) menyatakan bahwa :” Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat”.

Pemberdayaan adalah salah satu upaya penguatan masyarakat dalam sosial oleh klompok masyarakat.

Menurut Hikmat (2010:3) menyatakan bahwa:” Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut”.

Pemberdayaan merupakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri sendiri dan masyarakatnya.

Selanjutnya menurut Suharto (2004:1) menyatakan bahwa :

” Pemberdayaan adalah pekerjaan sosial dan kegiatan kemanusiaan yang sejak dulu telah dimiliki perhatian yang mendalam pada keadaan masyarakat miskin”.

Dengan demikian bahwa pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

Menurut Mardikanto (2014:152) menyatakan bahwa :” Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat”.

Pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat mengajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada Bab 1 pasal 1 undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Rudjito (2003) menyatakan bahwa : “Usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.”

Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang berperan penting bagi perekonomian negara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tambunan (2015:2) menyatakan bahwa :

“Usaha mikro kecil dan menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi pada prinsipnya, pembedaaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar umumnya didasarkan pada nilai

aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap negara”.

Perbedaan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat dari aset awal, omset rata-rata dan jumlah pekerja tetap. Usaha ini sama-sama dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.

Menurut Nayla (2016:12) menyatakan bahwa :

“Secara umum usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan)”.

Usaha kecil menengah adalah usaha yang didirikan oleh perseorangan yang memiliki kekayaan tertentu sesuai batasannya.

Selanjutnya menurut kementerian Koperasi dan UMKM dalam Aufar (2015:8) menyatakan bahwa :

‘Usaha kecil, termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1000.000.000. Sementara itu, usaha menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih

besar dari Rp 200.000.000 s.d Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan’.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha perseorangan yang berdiri sendiri atau badan usaha disemua sektor ekonomi dengan kriteria tertentu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dimana peneliti ingin menggambarkan suatu fenomena melalui fakta-fakta dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan (DISKUKMP) Kota Banjar

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan terhitung dari Bulan Desember 2021 sampai Bulan Juni 2022 dengan jumlah informan sebanyak 6 orang, terdiri dari Kepala Dinas, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM, pelaku UMKM Kecamatan Pataruman, pelaku UMKM Kecamatan Langensari, pelaku UMKM Kecamatan Banjar, pelaku UMKM Kecamatan Purwahaarja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan (DISKUKMP) Kota Baanjar, dilakukan dengan penelitian dengan

menggunakan tiga dimensi yaitu : peningkatan pengetahuan teknis, perbaikan manajemen, pengembangan jiwa kewirausahaan, peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi, advokasi kebijakan

1. Peningkatan Pengetahuan Teknis

Peningkatan pengetahuan teknis memiliki indikator Adanya pelatihan bagi pelaku UMKM oleh dinas. Adanya usaha peningkatan nilai tambah produk UMKM melalui pengemasan yang menarik oleh dinas. Berdasarkan observasi di lapangan bahwa Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar terkait adanya pelatihan bagi pelaku UMKM oleh dinas sudah berjalan dengan optimal. Sedangkan adanya peningkatan nilai tambah produk UMKM melalui pengemasan yang menarik juga sudah berjalan dengan optimal.

Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam adanya pelatihan bagi UMKM yakni adanya keterbatasan dana, keterbatasan tenaga pegawai dan keterbatasan waktu.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut pihak dinas memiliki upaya dalam menghadapi hambatan tersebut, melalui memilih UMKM yang lebih memerlukan binaan.

2. Perbaikan Manajemen

Pada dimensi perbaikan manajemen ini terdapat 2 indikator dalam pemberdayaan UMKM oleh

Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, yaitu adanya perbaikan sistem pengelolaan produk-produk yang dihasilkan UMKM dan adanya pengembangan jejaring kemitraan UMKM melalui kerjasama dengan pelaku usaha yang lebih besar.

Berdasarkan observasi di lapangan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar terkait adanya perbaikan sistem pengelolaan produk-produk yang dihasilkan UMKM sudah berjalan dengan optimal. Sedangkan adanya pengembangan jejaring kemitraan UMKM melalui kerjasama dengan pelaku usaha yang lebih besar belum terlaksana secara optimal.

Hamabatan yang di hadapi dalam perbaikan manajemen yakni pelaku UMKM yang kurang berinisiatif sendiri dan merasa cukup dengan pendapatan yang didapat.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yakni dengan terus melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.

3. Pengembangan Jiwa Kewirausahaan

Dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dalam pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar terdapat dua indikator, yakni adanya sosialisasi terkait pengembangan UMKM dan adanya pengoptimalan peluang bisnis UMKM melalui pengiklanan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar terkait adanya sosialisasi terkait pengembangan UMKM sudah berjalan dengan optimal. Sedangkan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar terkait adanya pengoptimalan peluang bisnis UMKM melalui pengiklanan belum terlaksana dengan optimal.

Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan jiwa kewirausahaan yakni adanya keterbatasan anggaran untuk bantuan pelaku UMKM dalam pengembangan produk.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut hanya melalui pengadaan periklanan dengan pameran-pameran.

4. Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Modal, Pasar dan Informasi

Dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dalam pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar terdapat dua indikator, yakni adanya akses pemasaran yang lebih luas dan adanya bantuan permodalan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan UMKM.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dalam pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan dengan adanya akses pemasaran yang lebih luas belum terlaksana secara optimal. Sedangkan

adanya bantuan permodalan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan UMKM juga belum optimal.

Dalam dimensi ini tidak ada hambatan yang dihadapi karena memang tidak adanya anggaran untuk bantuan permodalan dan pengiklanan.

5. Advokasi Kebijakan

Dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dalam pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar terdapat dua indikator, yakni adanya jaminan pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM serta adanya peraturan yang mengatur tentang produk UMKM yang dapat diperjual belikan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dalam pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan dengan adanya jaminan pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM sudah berjalan dengan optimal. Sedangkan adanya peraturan yang mengatur tentang produk UMKM yang dapat diperjual belikan masih kurang optimal.

Hambatan yang di hadapi dalam dimensi advokasi kebijakan yakni masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki perizinan resmi.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut yakni dengan terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya perizinan sebuah produk UMKM.

KESIMPULAN

Bersasarkan pembahasan hasil dari penelitian mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan (DISKUKMP) Kota Banjar, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar sudah dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan upaya-upaya pemberdayaan. Seperti kurangnya pengadaan pengembangan jejaring kemitraan UMKM melalui kerjasama dengan pelaku usaha yang lebih besar, kurangnya pengoptimalan peluang bisnis UMKM melalui pengiklanan, belum optimalnya peningkatan akses pemasaran UMKM yang lebih luas, kurangnya bantuan permodalan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan UMKM, serta belum optimalnya peraturan yang mengatur produk UMKM yang dapat diperjual belikan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan dana anggaran, keterbatasan tenaga pekerja, keterbatasan waktu. Selain itu hambatan yang dihadapi kurangnya kesadaran pelaku UMKM dalam pembuatan perizinan produk, pelaku UMKM juga hanya mengandalkan bantuan dari pihak dinas tanpa adanya

inisiatif sendiri. Pelaku UMKM yang sudah merasa cukup dengan penghasilan yang didapat juga merupakan hambatan UMKM dalam berkembang. Penggunaan market place yang masih belum optimal dikarenakan banyaknya pelaku UMKM yang gagap teknologi, hal ini yang menjadi salah satu hambatan dinas dalam pemberdayaan pelaku UMKM.

Selanjutnya sudah dilaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kota Banjar yaitu dengan lebih memprioritaskan UMKM yang memerlukan binaan lebih, melakukan kerjasama dengan perbankan mitra pemerintah, TNI dan KAPOLRI untuk bantuan dana anggaran dan bantuan permodalan, selain itu penempatan rak-rak makanan di beberapa rumah makan dan toko yang ada di Kota Banjar untuk penempatan produk-produk UMKM yang ada di Kota Banjar, melakukan kunjungan, penyuluhan, sosialisasi serta pelatihan bagi UMKM. Menampilkan produk UMKM dalam berbagai event yang ada di Kota Banjar juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan. Serta penerapan untuk mencintai produk dalam negeri dan mempermudah perizinan produk merupakan salah satu upaya pihak dinas untuk memberdayakan UMKM Kota Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdurohim. 2021. *Pengembangan UMKM*. Bandung. Refika Aditama.

Creswell. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Djama'an, Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Hanim, Noorman. *UMKM & Bentuk-bentuk Usaha*. Semarang. Unissula Press.

Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Mardikanto, Soebianto, Poerwoko, Totok, 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Silalahi, Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sumodiningrat. 2015. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media.

Wilantara, Susilawati. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung. Refika Aditama.

Dokumen Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Kota Banjar.